

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH



PENETAPAN RENCANA KERJA 2022 BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH

**BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH**

Jalan Gajah Mada No 3 Sungai Penuh Telp. (0748) 22928 Fax.

(0748) 323630



PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH

Jl. GajahMadaNo.3 Telp (0748)22928 Fax. (0748) 323630

SUNGAI PENUH

Website:

e-mail :Kode pos 37112

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH

NOMOR : 050/Kep.96.a/Bakeuda/2021

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2022

- Menimbang : a. Bahwa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sungai Penuh Tahun 2022 telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sungai Penuh Tahun 2022;
- b. Bahwa untuk menjabarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja (Renja) dan menetapkan Rencana Kerja dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah tentang Penetapan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2019 Tentang Sistem Informasi

- Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 16. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jambi Tahun 2021;
 17. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2012 Nomor 6);
 18. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2012 Nomor 5);
 19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 10);
 20. Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021 Nomor 17);
 21. Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun 2022.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA SKPD) BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2022.
- KESATU : Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2022 mengacu Kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sungai Penuh Tahun 2022;
- KEDUA : Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahun yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
- KETIGA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disusun untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas perencanaan dan Penganggaran daerah.

- KEEMPAT : Sistematika Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah memuat:
- BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
 - BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
 - BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD
 - BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN :

I. Tabel Renja 2022 Permendagri 90 Tahun 2019 sesuai RKPD 2022.

- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan bila ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dirubah sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal, 06 Juli 2021



**KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH**

AFYAR ST, MT
Pembina Tk. I

NIP. 19731227 200604 2 015

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Sungai Penuh di Sungai Penuh (sebagai laporan)
2. Kepala Bappeda Kota Sungai Penuh di Sungai Penuh
3. Arsip

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga Penetapan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2022 dapat disusun dan diselesaikan tepat waktu.

Penetapan Renja SKPD sebagai dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, Penetapan Renja Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh tahun 2022 ini memberikan informasi rencana kebijakan, program dan kegiatan/ Sub Kegiatan Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh yang akan dilaksanakan tahun 2022 untuk mendukung penerapan *good governance* yang mendorong peningkatan pelayanan publik dan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

Kami sampaikan penghargaan dan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan berpartisipasi aktif dalam penyelesaian laporan ini. Kami berharap Rencana Kerja ini dapat menjadi panduan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh tahun 2022 sebagai upaya penyempurnaan kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh dimasa mendatang. Semoga semua daya upaya kita dalam membangun “*Terwujudnya Kota Sungai Penuh Maju (Mandiri, Agamis, Jujur dan Unggul) Dan Berkeadilan*” senantiasa memperoleh petunjuk serta ridha Allah SWT.

Sungai Penuh, Juli 2021

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH**



AFYAR, ST, MT
Pembina Tk. I

NIP. 19731227200604 1 015

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
Bab IPENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
Bab II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KEUANGAN DAERAH	
TAHUN 2020	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Keuangan Daerah Tahun 2020.....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah	18
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Daerah.....	24
2.4 Reviu terhadap Penetapan RKPD	25
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	41
Bab III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	42
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	42
3.1.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional.....	42
3.1.2 Telaah terhadap Kebijakan Provinsi/ Daerah	43
3.1.3 Telaah Terhadap RPJMD Kota Sungai Penuh tahun 2021-2025.....	43
3.2 Tujuandan Sasaran Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah	44
3.3 Program dan Kegiatan.....	45
Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KEUANGAN DAERAH	57
Bab V PENUTUP	70



BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam rangka itu di perlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, transparan, dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Salah satu tolak ukurnya adalah perencanaan yang sistematis, sebab saat ini hampir di semua Negara sudah menerapkan Rencana Kerja.

Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh tahun 2022 merupakan penjabaran pelaksanaan Teknokratik RPJMD 2021 - 2025 . Penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan daerah Kota Sungai Penuh tahun 2022 juga sebagai bahan untuk penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sungai Penuh tahun 2022 dimana dalam penetapan Rencana Kerja Pembangunan Daerah merupakan tahun keempat perencanaan tahap pertama pelaksanaan RPJMD 2021 - 2025 dengan tema Pemantapan pelaksanaan “Terwujudnya Kota Sungai Penuh Maju (Mandiri, Agamis, Jujur dan Unggul) Dan Berkeadilan”



1.2. Landasan Hukum.

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh ini yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);



11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jambi Tahun 2021;
18. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2012 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2012 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 10);
21. Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021 Nomor 17);
22. Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun 2022.



1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dibuatnya Renja Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh adalah untuk menjabarkan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Kota Sungai Penuh Tahun 2022 secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan posisi dan peran yang diemban didalamnya.

Tujuan penyusunan Renja Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh tahun 2022 adalah:

1. Sebagai pengendali Kegiatan di Badan Keuangan Daerah agar terarah.
2. Tercapainya sasaran yang telah ditetapkan sesuai perencanaan;
3. Sebagai pedoman penyusunan kegiatan di Badan keuangan daerah;
4. Sebagai dasar dalam mengevaluasi kinerja kegiatan di Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh.

Dengan demikian dokumen Renja Badan Keuangan Daerah tahun 2021 ini sebagai pedoman dan arah didalam menyusun anggaran kegiatan Badan keuangan daerah dan sebagai dasar penentuan KUA dan PPAS, serta RKA APBD Tahun Anggaran 2022 oleh Badan Keuangan daerah Kota Sungai Penuh.

Dari sebuah siklus manajemen pemerintahan maka Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Pengelolaan Anggaran Daerah, Pengelolaan Pendapatan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Penatausahaan Keuangan Daerah, dan Pengelolaan Aset Daerah Kota Sungai Penuh. Untuk mengoptimalkan peran dan wewenang tersebut, kepada Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh diamanatkan tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2022 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.



BAB II HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN 2022

Memuat pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu; Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review Terhadap Penetapan RKPD serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah serta Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

Bab ini memuat rencana kerja dan pendanaan SKPD yang sesuai dengan RPJMD 2021 - 2025.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa: catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.



BAB II

HASILEVALUASI RENJA BADAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Keuangan Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra SKPD 2016 - 2021

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2020 dan pencapaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kota Sungai Penuh Tahun 2016-2021 diperlukan sebagai dasar penyusunan Renja Tahun 2021. Evaluasi Renja tahun lalu dan capaian Renstra atas pelaksanaan program dan kegiatan Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh dimaksud dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan OPD.

Secara umum dari sasaran strategik yang telah ditetapkan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh telah dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Keberhasilan ini terlihat dari capaian indikator sasaran yang mencapai target yang diharapkan. Di sisi lain, keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran tak lepas dari keberhasilan pencapaian kinerja kegiatan pada masing-masing bagian organisasi.

Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2020 mempunyai 8 Program dan 58 Kegiatan yang pelaksanaannya didasarkan pada Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 43 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 12); Kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) yang dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

Secara umum tugas Badan Keuangan Daerah adalah membantu Walikota dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi pelayanan pengelolaan pendapatan daerah, pelayanan dalam proses penganggaran daerah, proses pencairan belanja langsung dan tidak langsung, penyusunan laporan keuangan daerah, pelayanan dalam pengelolaan Barang milik daerah. Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh telah melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Dari 58 (Lima Puluh Delapan) kegiatan yang telah ditetapkan, secara umum telah mencapai target kinerja yang diharapkan namun masih terdapat beberapa kegiatan yang belum mencapai target yang diinginkan dikarenakan terdapat beberapa kendala dalam



pelaksanaannya hal ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat dan regulasi (peraturan).

Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2020 mengadakan pengukuran capaian kinerja pada seluruh kegiatan yang sumber dananya berasal dari APBD. Dengan diterapkannya Anggaran Berbasis Kinerja, maka indikator kegiatan yang digunakan dalam pengukuran kinerja menggunakan sumber data dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja. Realisasi capaian kinerja sasaran secara keseluruhan adalah sebesar 99,76 % yang dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.

2.1.1. Evaluasi capaian RENJA Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh tahun 2020.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sungai penuh nomor 12 tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh tahun anggaran 2020, Badan Keuangan Daerah mendapat alokasi anggaran sebagai berikut :

- A. Pendapatan pajak daerah sebesar Rp.5.258.862.364,89- terealisasi sebesar Rp. 7.301.415.913,00,- dengan capaian 138,84 %
- B. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 14.404.667.185,55 terealisasi sebesar Rp. 4.396.703.528,00,- dengan capaian 30,52 %
- C. Belanja Langsung sebesar Rp. 5.661.754.974,46 terealisasi sebesar Rp. 5.467.015.208,- dengan melaksanakan 8 Program dan 58 Kegiatan. Berdasarkan hasil realisasi capaian kinerja sasaran secara keseluruhan adalah sebesar 96,55 % yang dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian kinerja sasaran program/kegiatan, walaupun rata-rata namun dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai macam kendala serta hambatan sebagaimana dapat dijelaskan dibawah ini:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 13 (Tiga belas) kegiatan/indikator kinerja yang ditetapkan sebagai tolak ukur keberhasilan sasaran, kegiatan tersebut telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%.

Layaknya disetiap SKPD pelaksanaan program/kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran merupakan kegiatan rutin perkantoran yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan rutin kantor. Dalam pelaksanaan dan juga realisasi tahun anggaran 2020 tidak terdapat kendala dan hambatan yang berarti, namun terdapat beberapa kegiatan yang harus ditingkatkan dari segi anggaran pada tahun 2021, diantaranya :



- (1) Penyediaan komponen instalasi listrik, penerangan bangunan kantor
- (2) Peningkatan dan Pengembangan Disiplin Kepegawaian.

Mengingat Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh merupakan pelayanan public dimana biaya untuk menunjang operasional baik berupa listrik, internet dan yang lainnya yang semakin meningkat serta perlu adanya penyelarasan program dan kegiatan dengan organisasi sejenis di level yang lebih tinggi. Peningkatan disiplin aparatur di Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh juga menjadi fokus utama dikarenakan jumlah pegawai seluruhnya mencapai 87 orang.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 4 (Empat) kegiatan/indikator kinerja yang ditetapkan sebagai tolak ukur keberhasilan sasaran, kegiatan tersebut telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%.

Pelaksanaan program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dimaksudkan untuk memenuhi fasilitas/kebutuhan kantor berupa Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, Pengadaan Peralatan Gedung kantor, dan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. Dalam pelaksanaan dan juga realisasi tahun anggaran 2020 tidak terdapat kendala dan hambatan yang berarti atau telah sesuai dengan target yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2020. Namun terdapat beberapa kegiatan yang harus ditingkatkan dari segi anggaran pada tahun 2021, diantaranya

- 1) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Mengadakan Lemari Arsip, Filling Kabinet dan Pengecatan Ruangan Kantor

- 2) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Mengingat Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh dalam melaksanakan tugasnya dalam mengimplementasikan sistem informasi yang berbasis teknologi dan saling terintegrasi untuk pendapatan, keuangan dan aset Daerah maka perlu ditambah pengadaan Komputer PC, Laptop, Printer, Mesin Genset, Mesin Foto Copy, Mesin Penghitung Uang.

- 3) Pengadaan Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor; berupa

- a) Untuk Service PC, Laptop, Printer, Server, AC, Mesin Parforasi, Mesin Genset dan CCTV.



3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdiri dari 1 (satu) kegiatan/indikator kinerja yang ditetapkan sebagai tolak ukur keberhasilan sasaran, kegiatan tersebut telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%. Pelaksanaan program/kegiatan Peningkatan Disiplin Aparatur sebagai upaya untuk meningkatkan disiplin serta kinerja aparatur di setiap dinas/instansi pemerintah. Untuk lingkup Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh Kegiatan ini telah mencapai target yang sudah ditetapkan di awal tahun sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2020.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari 1 (satu) kegiatan/indikator kinerja yang ditetapkan sebagai tolak ukur keberhasilan sasaran, kegiatan tersebut telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100 %. Pelaksanaan program/kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebagai upaya untuk meningkatkan SDM aparatur di setiap dinas/instansi pemerintah. Untuk mewujudkan suatu organisasi yang handal dan professional maka diperlukan pendidikan dan pelatihan (Diklat) yang merupakan suatu upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur agar dapat mengimbangi tuntutan clean governance dan mewujudkan ke Pemerintahan yang baik (Good government) dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Untuk itu, indikator dari hasil program ini berbasis kepada peningkatan kompetensi yang relevan dengan tuntutan bidang kerja setiap jenjang jabatan yang ada di lingkungan aparatur. Peningkatan kompetensi ini diharapkan bias menghasilkan instansi yang berdedikasi dan memiliki wawasan operasional untuk membangun suatu pemerintahan yang baik, sehingga mampu memenuhi tuntutan perubahan dari lingkungannya sebagai kekuatan internal dalam menghadapi tantangan kemajuan.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan terdiri dari 3 (Tiga) kegiatan/indikator kinerja yang ditetapkan sebesar 100% sebagai tolak ukur keberhasilan sasaran, kegiatan tersebut telah mencapai target yang telah ditetapkan. Namun demikian disadari bahwa meskipun realisasi fisik sepenuhnya telah mencapai target, tapi yang paling pokok adalah bagaimana laporan yang dibutuhkan oleh instansi horizontal bisa terpenuhi dengan baik, karena itu diperlukan dukungan semua *Stakeholders*, kegiatan tersebut telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100 %.

Dan untuk lebih meningkatkan lagi output dan outcome program dan kegiatan pelaporan ini, sedapat mungkin di tahun berikutnya terdapat beberapa kegiatan yang dapat mewadahi perencanaan dan pelaporan serta anggaran pelaksanaan kegiatannya bisa dilakukan penambahan, mengingat banyaknya output dan outcome dari kegiatan pelaporan ini yang sangat vital bagi SKPD maupun bagi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini adalah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan public dan juga sebagai koordinator untuk merumuskan kebijakan dalam hal pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah dan melakukan pembinaan administrasi Keuangan Daerah. Program ini terdiri dari 27 (Dua Puluh Tujuh) kegiatan/indicator kinerja yang ditetapkan sebagai tolak ukur keberhasilan sasaran. Kegiatan tersebut telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 99 %. Secara teknis pelaksanaannya sudah sesuai dengan target yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Namun terdapat beberapa kegiatan yang belum mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya, hal ini terkait dengan adanya kebijakan serta regulasi dari pemerintah pusat hingga kegiatannya belum bisa dilaksanakan.

7. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota terdiri dari 3 (Tiga) kegiatan/indicator kinerja yang ditetapkan sebagai tolak ukur keberhasilan sasaran, kegiatan tersebut telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%. Dalam pelaksanaan dan juga realisasi Tahun Anggaran 2020 tidak terdapat kendala dan hambatan yang berarti atau telah sesuai dengan target yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2020.

8. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Daerah

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Daerah terdiri dari 6 (Enam) indikator kinerja yang ditetapkan sebagai tolak ukur keberhasilan sasaran, semua kegiatan telah mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 100%.

Dalam pelaksanaan dan juga realisasi Tahun Anggaran 2020 tidak terdapat kendala dan hambatan yang berarti atau telah sesuai dengan target yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2020.



2.1.2. Evaluasi Capaian RENSTRA Perubahan Badan Keuangan daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 – 2021.

Berdasarkan Rencana Strategik Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh dan Rencana Kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2020, maka capaian kinerja sasaran strategik secara kuantitatif dapat disajikan dalam bentuk matrik analisis sebagaimana tabel berikut:



Tabel 2.1

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d. Tahun 2020
Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD RPJMD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d. Tahun Berjalan	
					Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d. Tahun Berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Usuran Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan									
	Bidang Penunjang Keuangan									
4	04 5	0 1	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN	Terwujudnya Pengelolaan Administrasi Perkantoran yang tertib					
4	04 5	0 1	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang dilayani per tahun	12	12	100	12	100
4	04 5	0 1	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Bidang yang dilayani per tahun	12	12	100	12	100
4	04 5	0 1	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan dan Pembayaran Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran	12	12	100	12	100
4	04 5	0 1	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya Pembayaran Honor Penjaga Kebersihan dan Tersedianya Alat-alat Kebersihan	12	12	100	12	100
4	04 5	0 1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya penyediaan Alat Tulis Kantor	12	12	100	12	100
4	04 5	0 1	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Cetak dan Penggandaan	12	12	100	12	100



RENCANA KERJA | 2022

4	04	05	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Alat-alat Listrik dan Penerangan Kantor	12	12	12	12	100	12	12	100
4	04	05	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Surat Kabar dan Majalah	12	12	12	12	100	12	12	100
4	04	05	01	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12	12	12	12	100	12	12	100
4	04	05	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	12	12	12	12	100	12	12	100
4	04	05	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	12	12	12	12	100	12	12	100
4	04	05	01	19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pendukung Pelayanan Perkantoran	12	12	12	12	100	12	12	100
4	04	05	01	21	Peningkatan dan Pengembangan Disiplin Kepegawaian	Terlaksananya Peningkatan dan Pengembangan Disiplin Kepegawaian	12	12	12	12	100	12	12	100
4	04	05	02	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								100
4	04	05	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Kantor	100	0	100	100	100	100	100	100
4	04	05	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Kantor	100	100	100	100	100	100	100	100
4	04	05	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Gedung Kantor	12	100	100	100	100	100	100	100
4	04	05	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Opsional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas	12	100	100	100	100	100	100	100
4	04	05	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Perawatan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	12	100	100	100	100	100	100	100
4	04	05	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya Kinerja Aparatur								
4	04	05	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	110 stel	100 stel	0 stel	0 stel	0	100	100	100
4	04	05	05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Formal								
4	04	05	05	01	Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	25 orang	25 pegawai	5 pegawai	5 pegawai	100	3 pegawai	60	100



RENCANA KERJA | 2022

4	04	05	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
4	04	05	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Evaluasi Kinerja SKPD, Laporan Fisik dan Keuangan, e-planning, Laporan AD-PPK dan PMPRB, LKPJ, Tapkin, LPPD, LKj-ip	40 dokumen	32 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	100	9 dokumen	100
4	04	05	06	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	100
4	04	05	06	12	Penyusunan Perencanaan Anggaran SKPD	Terlaksananya Penyusunan Renja SKPD, RKA dan DPA SKPD, Perjanjian Kinerja (PK) SKPD, SIPP, Kerangka Acuan Kerja (KAK) SKPD	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100	6 dokumen	100
4	04	05	17		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Terwujudnya pengelolaan Pendapatan, penganggaran, Penatausahaan Keuangan dan pelaporan yang transparan dan akuntabel							
4	04	05	17	1	Penyusunan Analisa dan Standar Belanja	Terlaksananya standar Analisa Belanja	100	100	100	100	100	100	100
4	04	05	17	3	Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Rancangan Peraturan tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi	100	100	0	0	0	0	100
4	04	05	17	4	Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Pembayaran TAPD, ADD Hibah/Bansos, Samisake dan Bantuan parpol	100	100	0	0	0	0	0
4	04	05	17	6	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Tersedianya Buku Ranperda APBD Kota Sungai Penuh	100	100	100	100	100	100	100
4	04	05	17	7	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Terlaksananya penyusunan APBD 2016	100	100	100	100	100	100	100
4	04	05	17	8	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	Tersedianya penyusunan RAPBD-P dan APBD-P Kota sungai penuh	100	100	100	100	100	100	100
4	04	05	17	9	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersedianya Ranperwako tentang Penjabaran Perubahan APBD	100	100	100	100	100	100	100
4	04	05	17	10	Penyusunan Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan	Tersedianya Ranperda/Perda tentang pertanggungjawaban APBD Kota Sungai	100	100	100	100	100	100	100



RENCANA KERJA | 2022

					APBD	Penuh								
4	04	05	17	11	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersedianya rancangan/ Peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban APBD	100	100	100	100	100	100	100	100
4	04	05	17	12	Penyusunan sistem informasi keuangan daerah	Tertibnya pengkodean keuangan SKPKD	100	100	100	100	100	100	100	100
4	04	05	17	13	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersedianya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
4	04	05	17	14	Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya sosialisasi dan bimtek untuk banggar dan tim TAPD kota sungai penuh	100	100	100	100	100	100	100	100
4	04	05	17	19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumberpendapatandaerah	Terciptanya sumber-sumber pendapatan daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
4	04	05	17	20	Peningkatan Instensifikasi, Pelayanan Pajak Daerah	Terlaksananya pungutan pajak daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
4	04	05	17	21	Pengelolaan dan Penatausahaan Gaji Pegawai Kota Sungai Penuh	Tertibnya gaji pegawai kota sungai penuh	100	100	100	100	100	100	100	100
4	04	05	17	22	Penatausahaan Dana Perimbangan dan Pendapatan lain-lain yang sah	Tertibnya penatausahaan Dana Perimbangan dan pendapatan lain-lain yang sah	100	100	100	100	100	100	100	100
4	04	05	17	23	Peningkatan Manajemen Laporan Keuangan Dana Dekon dan TP dan DAK	Tersusunnya laporan realisasi dana tugas pembantuan dan urusan bersama dan DAK	100	100	100	100	100	100	100	100
4	04	05	17	26	Ekstensifikasi PBB dan BPHTB	Pembayaran PBB dan BPHTB bisa berjalan lancar dan sesuai aturan	100	100	100	100	100	100	100	100
4	04	05	17	27	Pemeliharaan dan Pengawasan Aplikasi dan Sistem database Keuangan	Terpenuhinya aplikasi SIMDA dan Database keuangan pemerintah kota Sungai penuh	100	100	100	100	100	100	100	100
4	04	05	17	34	Pengelolaan Realisasi Keuangan Daerah	realisasi keuangan daerah terlaksana dengan baik	100	100	100	100	100	100	100	100
4	04	05	17	35	Peningkatan dan Operasional TP-TGR Keuangan dan Barang	terlaksananya TPTGR	100	100	0	0	0	0	0	0



RENCANA KERJA | 2022

					Daerah								
4	04	05	17	39	Pendataan, Penilaian, Ketetapan dan Penatausahaan Pajak Daerah lainnya	Tercapainya target pajak daerah	100	100	0	0	0	0	0
4	04	05	17	42	Pembinaan dan Asistensi Penyusunan Neraca dan LRA SKPD	Terlaksananya laporan realisasi anggaran dan neraca SKPD sesuai dengan standar akuntansi pemerintah	100	100	100	100	100	100	100
4	04	05	17	44	Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah	Terwujudnya peningkatan pengelolaan perbendaharaan dan kas daerah yang cepat, tepat dan akurat	100	100	100	100	100	100	100
4	04	05	17	45	Maintenance Aplikasi Sipanda	Terdapatnya data pajak yang valid	100	100	100	100	100	100	100
4	04	05	17	50	Penatausahaan dan Pengelolaan pajak atas Belanja Daerah	Terlaksananya laporan DTH dan RTH Pemkot sungai penuh	100	100	100	100	100	100	100
4	04	05	17	51	Pekan Panutan Pajak, Sosialisasi PBB dan pajak lainnya	Terlaksananya pekan panutan PBB	100	100	0	0	0	0	0
4	04	05	17	52	rekonsiliasi Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Umum Daerah	Tersinkronisasinya posisi Kasda antara Pembukuan BUD dan Pihak Bank	100	100	100	100	100	100	100
4	04	05	17	55	Evaluasi dan Pengawasan Pelaporan TEPR	Rekonsiliasi TEPR	100	100	100	100	100	100	100
4	04	05	17	56	Penyusunan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh	100	100	100	100	100	100	100
4	04	05	17	57	Pembinaan dan Asistensi Penyusunan Laporan Perubahan Ekuitas	Asistensi dan Pembinaan Penyusunan Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas	100	100	0	0	0	0	0
4	04	05	17	62	Pengelolaan sistem penggajian dan tunjangan PNS	Tersedianya daftar gaji PNS Pemerintah Kota Sungai Penuh	100	100	100	100	100	100	100
4	04	05	17	63	Pengadministrasi Benda Berharga	Meningkatnya PAD dari Pajak dan Retribusi daerah	100	100	100	100	100	100	100
4	04	05	18		PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KAB/KOTA								



RENCANA KERJA | 2022

4	04	05	18	01	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kab/Kota	Tersedianya buku Ranperda/Perda tentang APBD , serta Ranperda/ Perda Perubahan APBD Kota Sungai Penuh	100	100	100	100	100	100	100	100
4	04	05	18	02	Evaluasi Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Kab/Kota	Tersedianya buku Ranperwako/Perwako tentang penjabaran APBD, tersedianya draf RKA SKPD, serta terlaksananya sosialisasi Program SIMDA Keuangan Bidang Anggaran	100	100	100	100	100	100	100	100
4	04	05	18	06	Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Keuangan daerah	Tersedianya Peraturan perundang-undangan Pengelolaan Keuangan daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
4	04	05	43		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN BMD									
4	04	05	43	02	Pelaksanaan Penataan dan Pengelolaan Aset	Terlaksananya kegiatan penataan dan pengelolaan asset	100	100	100	100	100	100	100	100
4	04	05	43	03	Penyusunan Standarisasi Barang dan Jasa	Tersusunnya standarisasi harga barang/jasa Pemerintah Kota Sungai Penuh	100	100	100	100	100	100	100	100
4	04	05	43	06	Peningkatan Aplikasi SIMDA - BMD	Terlaksananya pendataan aset melalui aplikasi simda BMD	100	100	100	100	100	100	100	100
4	04	05	43	08	Penyusunan RKBMD, RKPBM, dan DKBMD	Terlaksananya penyusunan laporan laporan pengadaan, RKBMD, RKPBM, dan DKBMD	100	100	100	100	100	100	100	100
4	04	05	43	13	Pelaksanaan Penyusunan laporan Tahunan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penyusunan laporan BMD Kota Sungai Penuh	100	100	100	100	100	100	100	100
4	04	05	43	14	Pelaksanaan Penilaian Aset Daerah	Terlaksananya Penilaian Aset Kota Sungai Penuh	100	100	100	100	100	100	100	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh

Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh melaksanakan urusan bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di lingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Berdasarkan Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Sungai Penuh melalui Sekretaris Daerah. Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Badan Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota Sungai Penuh sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Keuangan Daerah memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan sebagai pedoman melaksanakan tugas;
- b. Menyusun kebijakan teknis bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. Melaksanakan tugas dukungan teknis bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset



- daerah;
- e. Melaksanakan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - f. Melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - g. Mengarahkan penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervise di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - h. Mengendalikan urusan administrasi;
 - i. Membina, mengarahkan dan menyelenggarakan kegiatan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas;
 - j. Menyampaikan laporan kinerja;
 - k. Melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Badan;
 - l. Melaksanakan pelayanan public sesuai standar dan penyelesaian pengaduan pelayanan publik di lingkungan Badan;
 - m. Melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) di lingkungan Badan;
 - n. Melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (TAPKIN) Badan;
 - o. Melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) dan Laporan Tahunan Badan;
 - p. Melaksanakan pengumpulan bahan dan data penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, LPPD dan LKPJ;
 - q. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
 - r. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas;
 - s. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
 - t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- 1) Badan Keuangan Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang pendapatan;



- d. Bidang anggaran;
 - e. Bidang perbendaharaan;
 - f. Bidang akuntansi dan pelaporan;
 - g. Bidang pengelolaan aset;
 - h. Unit pelaksana teknis Badan; dan
 - i. Kelompok jabatan fungsional.
- 2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh.

Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh menetapkan dua program prioritas dengan dua indikator Kinerja Program sebagaimana yang tercantum didalam RPJMD 2016-2021 Kota Sungai Penuh, sebagai berikut:

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Indikator Kinerja Program: persentase terwujudnya peningkatan pengelolaan Pendapatan, Penganggaran, penatausahaan Keuangan.
2. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
Indikator Kinerja Program : Peningkatan kualitas pengelolaan Keuangan Daerah
3. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah
Indikator Kinerja Program: persentase terwujudnya peningkatan penatausahaan dan inventarisasi barang daerah

Pada tabel 2.2 berikut ini memberikan rincian pencapaian kinerja pelayanan Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh yang dilihat dari perbandingan target Renstra dan realisasi capaian Kinerja Badan Keuangan Daerah serta proyeksi pencapaian kinerja untuk tahun berjalan dan tahun 2020.



Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh

No	Indikator	SPM/ standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	13
1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah setiap tahun	0		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
2	Belanja Langsung terhadap Total APBD	0		51,50	48,45	44,48	39,63	34,08	54,63	56,97	49,21	56,50	44,25	39,82	
3	Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja Daerah	0		92,00	93,50	94,00	94,50	95,00	90,53	94,94	90,37	82,42	92,00	92,50	
4	Rasio belanja modal dibanding belanja daerah	0		23,35	21,10	18,58	15,86	13,04	25,21	29,45	21,87	20,54	20,42	18,38	
5	Rasio belanja pegawai tidak langsung dibanding dengan total belanja daerah	0		34,37	31,93	28,91	25,35	21,44	45,37	26,31	36,72	41,05	36,75	33,07	
6	Rasio silpa terhadap total belanja tahun sebelumnya	0		9,06	4,76	-2,32	-11,60	-18,26	7,09	5,42	6,71	11,05	5,75	5,17	
7	Persentase Meningkatnya Perkembangan Aset dan Laba Perusahaan Daerah	0		14,06	14,41	15,14	16,02	16,52	10,74	12,82	11	7,56	12,99	14,29	



8	Jumlah Asset Pemerintah Kota Sungai Penuh yang bersertifikat	0		96,50	97,25	98,00	98,75	99,50	78,00	85,87	88,04	87,5	90	95	
9	Persentase Aset Yang diserahkan oleh Kabupaten Kerinci	0		52,98	56,97	60,98	64,96	83,00	46,80	48,00	48,00	48,00	75	90	
10	Tingkat Kemadirian Keuangan Daerah (Rasio PAD terhadap seluruh Pendapatan dalam APBD (Realisasi)	0		7,56	8,28	8,91	9,59	10,24	4,59	4,70	4,31	4,19	9,59	10,24	
11	Efisiensi Pengelolaan PAD	0		4,69	4,14	3,59	3,04	5,01	5,01	5,70	5,86	5,29	3,04	3,02	
12	Rasio peningkatan PAD	0		13,38	10,48	10,55	10,65	10,75	-13,92	8,85	2,26	-16,76	10,65	10,75	



Pelayanan bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tampak berhasil jika didukung oleh :

- 1) Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah
- 2) Penyusunan dan penyampaian APBD tepat waktu
- 3) Meningkatnya perkembangan asset Daerah
- 4) Memperoleh opini WTP atas Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah setiap tahunnya.

1. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Terbatasnya sumber-sumber penerimaan PAD yang ada sehingga peluang untuk menambah potensi penerimaan juga terbatas
- 2) Belum Optimalnya Intensifikasi Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah
- 3) Belum sepenuhnya Aset yang seharusnya diserahkan oleh Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh terutama Aset-aset yang produktif
- 4) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan, pendapatan dan asset daerah.

b. Pemecahan Masalah / Solusi

- 1) Sosialisasi kepada Wajib Pajak dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah;
- 2) Melakukan Intensifikasi pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 3) Meningkatkan Kapasitas penerimaan PAD melalui Perencanaan yang lebih baik.
- 4) Untuk penyerahan aset dari Kabupaten kerinci sudah difasilitasi dari Pemerintah Provinsi Jambi dan Kementerian Dalam Negeri RI;
- 5) Adanya SIMDA Keuangan sebagai alat bantu pengelolaan keuangan daerah dan SIPD yang terstandarisasi oleh Kemeterian Dalam Negeri untuk seluruh PEMDA dan terintegrasi antar Perangkat Daerah dengan BPKAD selaku SKPKD



- 6) Penerapan Simda Keuangan Online ke seluruh SKPD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Daerah

Terdapat beberapa isu strategis yang patut diangkat dalam Renja ini dan perlu disiapkan landasan – landasannya untuk tahap pembangunan berikutnya Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan SOPD Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh tahun 2020, masih banyak kendala-kendala yang menyebabkan kurang optimalnya pencapaian target pada masing-masing bagian/bidang pada Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh. Permasalahan dan kendala tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Belum sepenuhnya Aset yang seharusnya diserahkan oleh Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh terutama Aset-aset yang produktif
- b) Penerapan SP2D Online ke seluruh SKPD dan belum sepenuhnya penerapan Transaksi Non Tunai yang meliputi pengeluaran Daerah dan Penerimaan Daerah.
- c) Belum Optimal Sistem Informasi yang ada untuk mendukung penerapan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
- d) Belum Optimalnya Produk hukum yang mengatur penerimaan pajak dan retribusi serta penerima pajak daerah.
- e) Terintegrasinya Simda Keuangan Ke Aplikasi Amel (LKPP)

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh, dengan arahan Kepala Daerah terkait dengan



prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatif yang disediakan untuk Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh dapat dilihat padatableberikutini.



Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022

Badan Keuangan Daerah

No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			100%	19.931.500.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			100%	19.931.500.000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat		100%	270.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat		100%	270.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sekretariat	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi SKPD	7 Dokumen	60,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sekretariat	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi SKPD	7 Dokumen	60,000,000	
	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Sekretariat	Terlaksananya Penyusunan Renstra dan Renja SKPD	4 Dokumen	50,000,000	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Sekretariat	Terlaksananya Penyusunan Renstra dan Renja SKPD	4 Dokumen	50,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Sekretariat	Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD (LKj-IP, LKPJ, LPPD, IKU, Cascading, Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan)	16 Laporan	90,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Sekretariat	Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD (LKj-IP, LKPJ, LPPD, IKU, Cascading, Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan)	16 Laporan	90,000,000	



	SKPD					SKPD					
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat	Terlaksananya Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	120,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat	Terlaksananya Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	120,000,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sekretariat		100%	18,273,000,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sekretariat		100%	18,273,000,000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sekretariat	Persentase pelayanan administrasi dan Persentase pelayanan sarana dan prasarana perkantoran Persentase penyusunan dokumen/ laporan keuangan	100 %	18,000,000,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sekretariat	Persentase pelayanan administrasi dan Persentase pelayanan sarana dan prasarana perkantoran Persentase penyusunan dokumen/ laporan keuangan	100 %	18,000,000,000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sekretariat	Persentase pelayanan administrasi dan Persentase pelayanan sarana dan prasarana perkantoran Persentase penyusunan dokumen/ laporan keuangan	100 %	53,000,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sekretariat	Persentase pelayanan administrasi dan Persentase pelayanan sarana dan prasarana perkantoran Persentase penyusunan dokumen/ laporan keuangan	100 %	53,000,000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sekretariat	Persentase pelayanan administrasi dan Persentase pelayanan sarana dan prasarana perkantoran Persentase penyusunan dokumen/ laporan keuangan	100 %	175,000,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sekretariat	Persentase pelayanan administrasi dan Persentase pelayanan sarana dan prasarana perkantoran Persentase penyusunan dokumen/ laporan keuangan	100 %	220,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sekretariat	Persentase pelayanan administrasi dan Persentase pelayanan sarana dan prasarana perkantoran Persentase penyusunan dokumen/ laporan keuangan	100 %	45,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sekretariat	Persentase pelayanan administrasi dan Persentase pelayanan sarana dan prasarana perkantoran Persentase penyusunan dokumen/ laporan keuangan	100 %	45,000,000	



	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sekretariat			240,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sekretariat			240,000,000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Sekretariat	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas Lapangan Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas Lapangan Beserta Perlengkapannya	100 ID Card 100 Stel	75,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Sekretariat	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas Lapangan Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas Lapangan Beserta Perlengkapannya	100 ID Card 100 Stel	75,000,000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sekretariat	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur	25 Aparatur/Tahun	165,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sekretariat	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur	25 Aparatur/Tahun	165,000,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sekretariat		100%	441,000,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sekretariat		100%	441,000,000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sekretariat	Terpenuhinya Peralatan Listrik dan Penerangan Kantor	11 Macam	8,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sekretariat	Terpenuhinya Peralatan Listrik dan Penerangan Kantor	11 Macam	8,000,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekretariat	Rasio Bidang yang terpenuhi kebutuhannya per tahun	6 Bidang	42,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekretariat	Rasio Bidang yang terpenuhi kebutuhannya per tahun	6 Bidang	42,000,000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sekretariat	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	2 Macam	18,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sekretariat	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	2 Macam	18,000,000	



RENCANA KERJA

2022

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sekretariat	Terlaksananya Logistik Kantor Terlaksananya Makan dan Minum	400 Macam 12 Bulan	31,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sekretariat	Terlaksananya Logistik Kantor Terlaksananya Makan dan Minum	400 Macam 12 Bulan	31,000,000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Sekretariat	Terlaksananya Cetak dan Penggandaan	13 Macam	30,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Sekretariat	Terlaksananya Cetak dan Penggandaan	13 Macam	30,000,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Sekretariat	Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan	2 Macam	12,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Sekretariat	Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan	2 Macam	12,000,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sekretariat	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	30 Kali	300,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sekretariat	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	30 Kali	300,000,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sekretariat		100%	352,500,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sekretariat		100%	352,500,000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sekretariat	Terciptanya Kondisi Kerja yang Baik dan Pelayanan yang Prima Terlaksananya pengadaan mesin/kartu absensi	5 Unit	350,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sekretariat	Terciptanya Kondisi Kerja yang Baik dan Pelayanan yang Prima Terlaksananya pengadaan mesin/kartu absensi	5 Unit	350,000,000	
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Sekretariat	Terpenuhinya Perlengkapan Kantor	1 Paket	2,500,000	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Sekretariat	Terpenuhinya Perlengkapan Kantor	1 Paket	2,500,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretariat			122,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretariat			122,000,000	



	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sekretariat	Jumlah Kantor/alamat yang dilayani pertahun	86 SKPD	4,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sekretariat	Jumlah Kantor/alamat yang dilayani pertahun	86 SKPD	4,000,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sekretariat	Rasio Bidang Yang Terpenuhi Kebutuhannya	12 Bulan	100,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sekretariat	Rasio Bidang Yang Terpenuhi Kebutuhannya	12 Bulan	100,000,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sekretariat	Terlaksananya Pembayaran Honor Penjaga Kebersihan dan Tersedianya Bahan dan Alat-alat Kebersihan	29 Macam	18,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sekretariat	Terlaksananya Pembayaran Honor Penjaga Kebersihan dan Tersedianya Bahan dan Alat-alat Kebersihan	29 Macam	18,000,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretariat		100%	233,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretariat		100%	233,000,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sekretariat	Terpeliharanya dan Terawatnya Secara Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	8 Unit	170,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sekretariat	Terpeliharanya dan Terawatnya Secara Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	8 Unit	170,000,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sekretariat	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	7 Macam	30,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sekretariat	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	7 Macam	30,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sekretariat	Terciptanya Suasana Kerja yang Kondusif	1 Jenis	33,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sekretariat	Terciptanya Suasana Kerja yang Kondusif	1 Jenis	33,000,000	
2.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			100%	8,238,285,595	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			100%	8,238,285,595	



RENCANA KERJA

2022

	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Bidang Anggaran		100%	3,063,285,595	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Bidang Anggaran		100%	3,063,285,595	
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Bidang Anggaran	Terlaksananya Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2023	2 Dokumen	425,000,000	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Bidang Anggaran	Terlaksananya Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2023	2 Dokumen	425,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Bidang Anggaran	Terlaksananya penyusunan rancangan KUPA dan PPAS - P Tahun 2022	2 Dokumen	350,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Bidang Anggaran	Terlaksananya penyusunan rancangan KUPA dan PPAS - P Tahun 2022	2 Dokumen	350,000,000	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Bidang Anggaran	Terlaksananya Evaluasi Ranperda dan Perda APBD, Ranperwako dan Perwako tentang Penjabaran APBD TA.2023 Terlaksananya Verifikasi DPA SKPD	2 Dokumen 2 Kali	82,016,000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Bidang Anggaran	Terlaksananya Evaluasi Ranperda dan Perda APBD, Ranperwako dan Perwako tentang Penjabaran APBD TA.2023 Terlaksananya Verifikasi DPA SKPD	2 Dokumen 2 Kali	82,016,000	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Bidang Anggaran	Terlaksananya Evaluasi Ranperda dan Perda APBD, Ranperwako dan Perwako tentang Penjabaran APBD TA.2023 Terlaksananya Tahapan dan Penyusunan Rancangan Perda APBD Murni TA.2023 Terlaksananya Tahapan Penyusunan Penyusunan Perwako APBD Murni TA. 2023 Terlaksananya Verifikasi DPA SKPD	2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Kali	994,324,675	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Bidang Anggaran	Terlaksananya Evaluasi Ranperda dan Perda APBD, Ranperwako dan Perwako tentang Penjabaran APBD TA.2023 Terlaksananya Tahapan dan Penyusunan Rancangan Perda APBD Murni TA.2023 Terlaksananya Tahapan Penyusunan Penyusunan Perwako APBD Murni TA. 2023 Terlaksananya Verifikasi DPA SKPD	2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Kali	994,324,675	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan	Bidang Anggaran	Terlaksananya Tahapan dan Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD-P TA	4 Dokumen	460,319,920	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan	Bidang Anggaran	Terlaksananya Tahapan dan Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD-P TA	4 Dokumen	460,319,920	



RENCANA KERJA

2022

	DPA-SKPD		2022, Asistensi RKA-SKPD Perubahan TA.2022, Penyampaian Nota Keuangan RAPBD-P TA.2022			DPA-SKPD		2022, Asistensi RKA-SKPD Perubahan TA.2022, Penyampaian Nota Keuangan RAPBD-P TA.2022			
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Bidang Anggaran	Terlaksananya Penyusunan Regulasi Standar Perjalanan Dinas Terlaksananya Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Keuangan Daerah Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan tentang pengelolaan Keuangan Daerah	1 Regulasi 2 Dokumen 2 Kali	500,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Bidang Anggaran	Terlaksananya Penyusunan Regulasi Standar Perjalanan Dinas Terlaksananya Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Keuangan Daerah Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan tentang pengelolaan Keuangan Daerah	1 Regulasi 2 Dokumen 2 Kali	500,000,000	
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Bidang Anggaran	Terlaksananya Penyusunan Regulasi Analisa Standar Belanja (ASB)	1 Regulasi	100,000,000	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Bidang Anggaran	Terlaksananya Penyusunan Regulasi Analisa Standar Belanja (ASB)	1 Regulasi	100,000,000	
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Bidang Anggaran	Terlaksananya Fasilitas Penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial Terlaksananya Fasilitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Terlaksananya Penyusunan Perwako Hibah	1 Dokumen 12 Bulan 1 Regulasi	151,625,000	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Bidang Anggaran	Terlaksananya Fasilitas Penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial Terlaksananya Fasilitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Terlaksananya Penyusunan Perwako Hibah	1 Dokumen 12 Bulan 1 Regulasi	151,625,000	
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Bidang Perbendaharaan		100%	1,470,000,000	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Bidang Perbendaharaan		100%	1,470,000,000	
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Bidang Perbendaharaan	Terlaksananya Laporan PNSD Gaji dan Tunjangan serta TPP Terlaksananya Pembukuan dan Pelaporan Dana Transfer Terlaksananya penyusunan Laporan	12 Laporan 2 Dokumen 260 Laporan 12 Dokumen	150,000,000	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Bidang Perbendaharaan	Terlaksananya Laporan PNSD Gaji dan Tunjangan serta TPP Terlaksananya Pembukuan dan Pelaporan Dana Transfer Terlaksananya penyusunan Laporan	12 Laporan 2 Dokumen 260 Laporan 12 Dokumen	150,000,000	



			Kas Daerah Terlaksananya penyusunan Laporan Perkiraan Belanja SIMPATIK Terlaksananya penyusunan Laporan Realisasi SINERGI Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah yang cepat, tepat dan akurat	1 Tahun				Kas Daerah Terlaksananya penyusunan Laporan Perkiraan Belanja SIMPATIK Terlaksananya penyusunan Laporan Realisasi SINERGI Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah yang cepat, tepat dan akurat	1 Tahun		
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Bidang Perbendaharaan	Terlaksananya Laporan Transaksi Non Tunai Terlaksananya Penerbitan SP2D dan Penyusunan Laporan Realisasi SKPD Terlaksananya Penyusunan Anggaran Kas dan Penerbitan SPD SKPD Terlaksananya Penyusunan Sistem Indormasi Pengelolaan Keuangan Daerah	2 Laporan 12 Bulan 4 Triwulan 1 Sistem	450,000,000	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Bidang Perbendaharaan	Terlaksananya Laporan Transaksi Non Tunai Terlaksananya Penerbitan SP2D dan Penyusunan Laporan Realisasi SKPD Terlaksananya Penyusunan Anggaran Kas dan Penerbitan SPD SKPD Terlaksananya Penyusunan Sistem Indormasi Pengelolaan Keuangan Daerah	2 Laporan 12 Bulan 4 Triwulan 1 Sistem	450,000,000	
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Bidang Perbendaharaan	Terlaksananya Pembukuan dan Pelaporan Dana Transfer	4 Dokumen	100,000,000	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Bidang Perbendaharaan	Terlaksananya Pembukuan dan Pelaporan Dana Transfer	4 Dokumen	100,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga	Bidang Perbendaharaan	Terlaksananya penyusunan Laporan Pajak Bulanan Tersedianya BA Rekonsiliasi Pajak antara KPPN, KPP dan Pemkot Sungai Penuh sebagai syarat penyaluran DBH Pajak	12 Laporan 2 Laporan	130,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga	Bidang Perbendaharaan	Terlaksananya penyusunan Laporan Pajak Bulanan Tersedianya BA Rekonsiliasi Pajak antara KPPN, KPP dan Pemkot Sungai Penuh sebagai syarat penyaluran DBH Pajak	12 Laporan 2 Laporan	130,000,000	



RENCANA KERJA

2022

	(PFK)					(PFK)					
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Bidang Perbendaharaan	Terlaksananya Rekonsiliasi Posisi Kas Daerah Antara Pembukuan BUD dengan Pihak Bank	4 Dokumen	120,000,000	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Bidang Perbendaharaan	Terlaksananya Rekonsiliasi Posisi Kas Daerah Antara Pembukuan BUD dengan Pihak Bank	4 Dokumen	120,000,000	
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Bidang Perbendaharaan	Terlaksananya Penerbitan Daftar Gaji SKPD Terlaksananya Petunjuk Teknis Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Terlaksananya Petunjuk Teknis Penerimaan dan pengeluaran Kas Tertibnya Administrasi Pembayaran Gaji Pegawai Kota Sungai Penuh	62 SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 12 Bulan	160,000,000	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Bidang Perbendaharaan	Terlaksananya Penerbitan Daftar Gaji SKPD Terlaksananya Petunjuk Teknis Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Terlaksananya Petunjuk Teknis Penerimaan dan pengeluaran Kas Tertibnya Administrasi Pembayaran Gaji Pegawai Kota Sungai Penuh	62 SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 12 Bulan	160,000,000	
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Bidang Perbendaharaan	Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi SIPD Keuangan Terlaksananya Petunjuk Teknis Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Terlaksananya Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Berbasis Aplikasi	1 Kali 1 Database 75 SKPD	360,000,000	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Bidang Perbendaharaan	Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi SIPD Keuangan Terlaksananya Petunjuk Teknis Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Terlaksananya Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Berbasis Aplikasi	1 Kali 1 Database 75 SKPD	360,000,000	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Bidang Akuntansi dan Pelaporan		100%	1,430,000,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Bidang Akuntansi dan Pelaporan		100%	1,430,000,000	



RENCANA KERJA

2022

	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Terlaksananya Transaksi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan	110,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Terlaksananya Transaksi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan	110,000,000	
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Terlaksananya Rekonsiliasi dan asistensi/Pembinaan Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, LO, Neraca , LPE SKPD	12 Laporan	120,000,000	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Terlaksananya Rekonsiliasi dan asistensi/Pembinaan Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, LO, Neraca , LPE SKPD	12 Laporan	120,000,000	
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Laporan Keuangan semester Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Sungai Penuh Laporan Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Sungai Penuh Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Sungai Penuh	2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan	520,000,000	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Laporan Keuangan semester Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Sungai Penuh Laporan Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Sungai Penuh Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Sungai Penuh	2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan	520,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Terlaksananya penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD Kota Sungai Penuh Tahun 2020 Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD Kota Sungai Penuh Tahun	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	400,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Terlaksananya penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD Kota Sungai Penuh Tahun 2020 Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD Kota Sungai Penuh Tahun	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	400,000,000	



	Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		2020			Kabupaten/Kota		2020			
	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Terlaksananya Penanganan Kasus TPTGR Terlaksananya Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	4 Kasus 1 Laporan	100,000,000	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Terlaksananya Penanganan Kasus TPTGR Terlaksananya Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	4 Kasus 1 Laporan	100,000,000	
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Terlaksananya Sosialisasi dan Pembinaan Tentang Penyusunan LKPD Kota Sungai Penuh Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Kali	120,000,000	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Terlaksananya Sosialisasi dan Pembinaan Tentang Penyusunan LKPD Kota Sungai Penuh Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Kali	120,000,000	
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Terlaksananya penyusunan Rancangan KDH Tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi, Bagan Akun Standar Akuntansi Pemerintah Daerah	2 Laporan	60,000,000	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Terlaksananya penyusunan Rancangan KDH Tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi, Bagan Akun Standar Akuntansi Pemerintah Daerah	2 Laporan	60,000,000	
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Sekretariat		100%	2,275,000,000	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Sekretariat		100%	2,275,000,000	
	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Sekretariat	Terlaksananya Penyusunan Kebijakan, Alokasi dan Pemberian Subsidi	5 Dokumen	125,000,000	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Sekretariat	Terlaksananya Penyusunan Kebijakan, Alokasi dan Pemberian Subsidi	5 Dokumen	125,000,000	
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan	Sekretariat	Terfasilitasinya Penyaluran Dana Desa/ Alokasi Dana Desa / Kelurahan Terlaksananya Penyusunan Kebijakan,	69 Desa 5 Dokumen	150,000,000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan	Sekretariat	Terfasilitasinya Penyaluran Dana Desa/ Alokasi Dana Desa / Kelurahan Terlaksananya Penyusunan Kebijakan,	69 Desa 5 Dokumen	150,000,000	



	Keuangan		Alokasi dan Penyaluran Bantuan keuangan Khusus			Keuangan		Alokasi dan Penyaluran Bantuan keuangan Khusus			
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Sekretariat	Terfasilitasinya Belanja Tidak Terduga	12 Bulan	2,000,000,000	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Sekretariat	Terfasilitasinya Belanja Tidak Terduga	12 Bulan	2,000,000,000	
3.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				2,237,775,215	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				2,237,775,215	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah			100%	2,237,775,215	Pengelolaan Barang Milik Daerah			100%	2,237,775,215	
	Penyusunan Standar Harga	Bidang Pengelolaan Aset	Tersusunnya Draft Standar SBU, SSH dan HSPK Ta. 2022	3 Dokumen	197,222,300	Penyusunan Standar Harga	Bidang Pengelolaan Aset	Tersusunnya Draft Standar SBU, SSH dan HSPK Ta. 2022	3 Dokumen	197,222,300	
	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Bidang Pengelolaan Aset	Tersusunnya Draft Standar SBU, SSH dan HSPK Ta. 2022 Tersusunnya Standar SBU, SSH dan HSPK Ta. 2022	3 Dokumen 3 Dokumen	167,409,000	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Bidang Pengelolaan Aset	Tersusunnya Draft Standar SBU, SSH dan HSPK Ta. 2022 Tersusunnya Standar SBU, SSH dan HSPK Ta. 2022	3 Dokumen 3 Dokumen	167,409,000	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Bidang Pengelolaan Aset	Terlaksananya Penyusunan Laporan Pengadaan RKBMD, RKPBMMD, DKBMD ta 2022 Terlaksananya Penyusunan Perubahan Laporan Pengadaan RKBMD, RKPBMMD, dan DKBMD ta 2022	1 Laporan 1 Laporan	167,409,000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Bidang Pengelolaan Aset	Terlaksananya Penyusunan Laporan Pengadaan RKBMD, RKPBMMD, DKBMD ta 2022 Terlaksananya Penyusunan Perubahan Laporan Pengadaan RKBMD, RKPBMMD, dan DKBMD ta 2022	1 Laporan 1 Laporan	167,409,000	
	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Bidang Pengelolaan Aset	Terlaksananya Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	50,000,000	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Bidang Pengelolaan Aset	Terlaksananya Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	50,000,000	



RENCANA KERJA

2022

	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Bidang Pengelolaan Aset	Terlaksananya Kegiatan Penataan Administrasi dan Pengelolaan Aset Terlaksananya Pelatihan Singkat Penataan dan Penilaian Barang Milik Daerah	7 Jenis Aset 100 %	316,939,650	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Bidang Pengelolaan Aset	Terlaksananya Kegiatan Penataan Administrasi dan Pengelolaan Aset Terlaksananya Pelatihan Singkat Penataan dan Penilaian Barang Milik Daerah	7 Jenis Aset 100 %	316,939,650	
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Bidang Pengelolaan Aset	Terlaksananya Verifikasi dan Pembuatan Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Kota Sungai Penuh Ta. 2022 Milik Daerah	25 Sertifikat	110,000,000	Pengamanan Barang Milik Daerah	Bidang Pengelolaan Aset	Terlaksananya Verifikasi dan Pembuatan Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Kota Sungai Penuh Ta. 2022 Milik Daerah	25 Sertifikat	110,000,000	
	Penilaian Barang Milik Daerah	Bidang Pengelolaan Aset	Terlaksananya Penilaian Aset Daerah Kota Sungai Penuh Ta. 2022	7 Jenis	167,544,000	Penilaian Barang Milik Daerah	Bidang Pengelolaan Aset	Terlaksananya Penilaian Aset Daerah Kota Sungai Penuh Ta. 2022	7 Jenis	167,544,000	
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Bidang Pengelolaan Aset	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	100,000,000	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Bidang Pengelolaan Aset	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	100,000,000	
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Bidang Pengelolaan Aset	Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Laporan	165,000,000	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Bidang Pengelolaan Aset	Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Laporan	165,000,000	
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Bidang Pengelolaan Aset	Terlaksananya Pendataan Barang Milik Daerah Melalui Aplikasi SIMDA-BMD Terlaksananya Rekonsiliasi Aset Lancar & Aset Tetap Ta. 2022	1 Data 1 Laporan	297,617,650	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Bidang Pengelolaan Aset	Terlaksananya Pendataan Barang Milik Daerah Melalui Aplikasi SIMDA-BMD Terlaksananya Rekonsiliasi Aset Lancar & Aset Tetap Ta. 2022	1 Data 1 Laporan	297,617,650	



	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Bidang Pengelolaan Aset	Terlaksananya Penyusunan Laporan BMD Kota Sungai Penuh Ta. 2022	1 Laporan	348,633,615	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Bidang Pengelolaan Aset	Terlaksananya Penyusunan Laporan BMD Kota Sungai Penuh Ta. 2022	1 Laporan	348,633,615	
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Bidang Pengelolaan Aset	Terlaksananya BIMTEK untuk Pengurus Barang, Pengguna Barang, Pembantu Pengurus Barang dan Penyimpan Barang SKPD Ta.2022	85 SKPD	150,000,000	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Bidang Pengelolaan Aset	Terlaksananya BIMTEK untuk Pengurus Barang, Pengguna Barang, Pembantu Pengurus Barang dan Penyimpan Barang SKPD Ta.2022	85 SKPD	150,000,000	
4.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				1,733,678,040	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				1,733,678,040	
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Bidang Pendapatan		100%	1,733,678,040	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Bidang Pendapatan		100%	1,733,678,040	
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Bidang Pendapatan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penerimaan PAD Terlaksananya penyusunan Laporan PAD Terlaksananya Penyusunan Perwako Pajak Daerah. Terlaksananya Sosialisasi PBB dan Pajak Daerah Lainnya	4 Kali 12 Laporan 3 Perwako 8 Kecamatan	955,000,000	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Bidang Pendapatan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penerimaan PAD Terlaksananya penyusunan Laporan PAD Terlaksananya Penyusunan Perwako Pajak Daerah. Terlaksananya Sosialisasi PBB dan Pajak Daerah Lainnya	4 Kali 12 Laporan 3 Perwako 8 Kecamatan	955,000,000	
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Bidang Pendapatan	Terlaksananya Host to Host PBB-P2 dan BPHTB bersama BPN Kota Sungai Penuh Terlaksananya Penilaian dan Verifikasi Objek PBB-P2 dan BPHTB Tersedianya DHKP PBB-P2 Tersedianya Laporan Dana Perimbangan Pusat dan Provinsi	1 Aplikasi 100 Dokumen 69 Desa 12 Laporan 20000 SPPT	200,000,000	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Bidang Pendapatan	Terlaksananya Host to Host PBB-P2 dan BPHTB bersama BPN Kota Sungai Penuh Terlaksananya Penilaian dan Verifikasi Objek PBB-P2 dan BPHTB Tersedianya DHKP PBB-P2 Tersedianya Laporan Dana Perimbangan Pusat dan Provinsi	1 Aplikasi 100 Dokumen 69 Desa 12 Laporan 20000 SPPT	200,000,000	



			Tersedianya SPPT PBB-P2					Tersedianya SPPT PBB-P2			
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Bidang Pendapatan	Terlaksananya maintenance aplikasi SIAPDA, SIM PBB dan BPHTB , Terlaksananya Pembayaran Biaya Pemungutan PBB untuk Petugas Pemungut Desa/Kelurahan Terlaksananya Pemuktahiran Basis Data Wajib Pajak Daerah Kota Sungai Penuh Tersedianya data Piutang Pajak Daerah	3 Aplikasi 69 Desa 9 Jenis Pajak Daerah 9 Dokumen	250,000,000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Bidang Pendapatan	Terlaksananya maintenance aplikasi SIAPDA, SIM PBB dan BPHTB , Terlaksananya Pembayaran Biaya Pemungutan PBB untuk Petugas Pemungut Desa/Kelurahan Terlaksananya Pemuktahiran Basis Data Wajib Pajak Daerah Kota Sungai Penuh Tersedianya data Piutang Pajak Daerah	3 Aplikasi 69 Desa 9 Jenis Pajak Daerah 9 Dokumen	250,000,000	
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Bidang Pendapatan	Terlaksananya Pelayanan Pajak Daerah Terlaksananya Penatausahaan Pajak Daerah	44 SKPD 9 Dokumen	60,000,000	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Bidang Pendapatan	Terlaksananya Pelayanan Pajak Daerah Terlaksananya Penatausahaan Pajak Daerah	44 SKPD 9 Dokumen	60,000,000	
	Penagihan Pajak Daerah	Bidang Pendapatan	Terlaksananya Penyediaan karcis Retribusi dan Benda Berharga lainnya Terlaksananya Parforasi Karcis Retribusi Terlaksananya penatausahaan pendistribusian karcis dan benda berharga	4400 Blok 4400 Blok 4400 Blok	230,000,000	Penagihan Pajak Daerah	Bidang Pendapatan	Terlaksananya Penyediaan karcis Retribusi dan Benda Berharga lainnya Terlaksananya Parforasi Karcis Retribusi Terlaksananya penatausahaan pendistribusian karcis dan benda berharga	4400 Blok 4400 Blok 4400 Blok	230,000,000	
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Bidang Pendapatan	Terlaksananya Pendataan Wajib Pajak Daerah Terlaksananya Penyusunan SOP Pajak Daerah	5 Jenis Pajak Daerah 9 Dokumen	38,678,040	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Bidang Pendapatan	Terlaksananya Pendataan Wajib Pajak Daerah Terlaksananya Penyusunan SOP Pajak Daerah	5 Jenis Pajak Daerah 9 Dokumen	38,678,040	



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh tidak secara langsung terlibat dengan masyarakat, LSM, serta Organisasi lainnya. Oleh karena itu, sampai saat ini Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh belum pernah mendapatkan usulan program atau kegiatan dari para *stakeholder* karena Badan Keuangan Daerah hanya menjalankan kegiatan yang bersifat rutinitas. Namun demikian terkait dengan usulan alokasi hibah dan bansos yang berupa uang, Badan Keuangan Daerah mengalokasikan anggaran dalam belanja tidak langsung berdasarkan rekomendasi di OPD sesuai kewenangannya.

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan*
1					
2					
3					

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.1.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Bahwapembangunan daerah merupakan dasar dalam mendukung tercapainya tujuan nasional. Oleh karena itu pelaksanaan pembamgunan di daerah tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan ditingkat nasional maupun provinsi.

Adapun Visi dari Direktorat Jendreal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri adalah Terkemuka dalam mewujudkan Pengelolaan keuangan Daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.

Beberapa kata kunci yang terkandunga dalam visi Direktorat Jenderal Keuangan Daerah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pengelolaan Keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif :

1. Pengelolaan Keuangan Daerah yang partisipatif.
Merupakan perwujudan penyusunan penganggaran daerah yang melibatkan seluruh satuan Kerja Perangkat Daerah.
2. Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transfaran.
Merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
3. Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif dan efisien.
Efektif merupakan pencapaian keluaran dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil, sedangkan Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertinggi.
4. Pengelolaan keuangan Daerah yang akuntabel.
Merupakan perwujudan pelaporan keuangan yang dapat diterima dan dipertanggungjawabkan.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah yang kompetitif.
Merupakan peruwujudan pengelolaan keuangan yang berkualitas dan dapat dibandingkan dengan yang lain.

Untuk mewujudkan visi tersebut misi yang diemban adalah :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran daerah.
2. Mendorong peningkatan pendapatan daerah, pengelolaan investasi dan kekayaan daerah
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan dana perimbangan.
4. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
5. Meningkatkan koordinasi, konsolidasi, dan keterpaduan program dalam peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah.

Mengkaji visi dan misi Direktorat Jenderal Keuangan Daerah memberikan tantangan bagi Badan Keuangan daerah Kota Sungai Penuh untk :

1. Mendorong terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien.

2. Mendorong peningkatan pendapatan daerah.
3. Mendorong peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah.

Sedangkan Arah kebijakan dan langkah strategis Kementerian Dalam Negeri tentang Pengelolaan Keuangan yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif melalui strategi sebagai berikut :

1. Mendorong penetapan Perda tentang APBD Provinsi/ Kabupaten/ Kota secara tepat waktu;
2. Mendorong penetapan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi/ Kabupaten/ Kota secara tepat waktu;
3. Mendorong peningkatan penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah dalam APBD;
4. Mendorong penerapan Akuntansi berbasis Akrual di Daerah;
5. Peningkatan kualitas belanja pada APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, terutama untuk pembangunan infrastruktur, pengelolaan pendidikan, kesehatan dan perumahan;
6. Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Barang Milik Daerah (BMD);
7. Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan dana perimbangan dan kemampuan fiskal Daerah.

3.1.2 Telaah Terhadap Kebijakan Provinsi Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi

Kebijakan umum yang dilaksanakan Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi dalam mewujudkan Visi dan Misi yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Jambi adalah :

1. Penyelenggaraan manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset Kabupaten/Kota;
3. Mendorong peningkatan Pendapatan Daerah dari Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi yang berupa : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

3.1.3 Telaah Terhadap RPJMD Kota Sungai Penuh tahun 2021-2024

RPJMD Kota Sungai Penuh tahun 2021-2024 yang berisi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sungai Penuh pada Tahun 2021-2024.

Pada Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh yang berkaitan dengan Misi Kota Sungai Penuh pada bagian kedua yaitu : ” Meningkatkan tata kelola pemerintahan Kota Sungai Penuh yang baik, mandiri dan bebas KKN” pada penjelasan tujuan yaitu : Meningkatkan kinerja pengelolaan pemerintahan yang baik, mandiri dan bebas KKN.

Berkaitan dengan hal tersebut terdapat beberapa indikator utama yang menjadi target Kota Sungai Penuh Khususnya SOPD Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh, yang dihasilkan dari beberapa Program dan Kegiatan utama, antara lain :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- 3) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
- 4) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Penyusunan Renja SKPD Tahun 2022 Berpedoman kepada RPJMD Kota Sungai Penuh 2021-2024 dengan Visi yaitu :

“Terwujudnya Kota Sungai Penuh Maju (Mandiri, Agamis, Jujur dan Unggul) Dan Berkeadilan 2021 -2024”

Untuk memperjelas tujuan dan sasaran yang hendak diwujudkan, pengertian visi di atas sebagai batasan operasionalnya, yaitu:

- Mandiri** : Diartikan bahwa kota sungai penuh sebagai daerah otonom memiliki kemampuan untuk mengelola semua potensi daerah yang dimiliki baik potensi sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia, sumber daya ekonomi, kelembagaan dan ide-ide serta gagasan inovatif yang berkembang dari diri sendiri yang dapat mempercepat pembangunan daerah
- Agamis** : Masyarakat yang taat dalam menjalankan agama yang tercermin dalam kehidupan masyarakat Sehari-hari baik itu dalam bentuk konsistensi penduduknya menjalankan nilai-nilai agama dan tumbuh berkembangnya organisasi sosial keagamaan sebagai wadah/tempat kajian keagamaan sebagai tuntunan untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
- Jujur** : Menjalankan kaidah atau aturan yang berlaku, menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) transparansi, partisipasi dan akuntabilitas sebagai unsur utama serta menghilangkan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nipotesme), terciptanya aparatur yang bersih dan dapat melaksanakan pembangunan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- Unggul** : Menjadi daerah yang mampu berperan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang memiliki daya saing yang kompetitif lebih tinggi dari daerah lainnya. Kemampuan tersebut tidak hanya mencakup SDM tetapi juga secara ekonomis.
- Berkeadilan** : Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, tanpa diskriminasi, baik antar Individu, golongan maupun antar wilayah, sehingga hasil dari pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Adapun misi yang akan ditempuh untuk mencapai visi tersebut adalah :

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berkarakter tinggi, berbasis nilai agama, dan budaya
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan Kota Sungai Penuh yang baik, mandiri dan bebas KKN
3. Pemantapan struktur perekonomian masyarakat dalam pengembangan potensi daerah
4. Pemerataan dalam peningkatan sarana dan prasarana wilayah serta prasarana dasar permukiman
5. Meningkatkan PAD
6. Menciptakan Pelestarian Lingkungan Hidup
7. Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban

8. Meningkatkan teknologi Teknologi nformasi di era Industri 4.0

Selanjutnya Badan Keuangan daerah dalam mewujudkan pencapaian Misi 2 tersebut berfokus pada tujuan dan sasaran pada RPJMD sebagai berikut :

Tujuan II : Meningkatkan kinerja pengelolaan pemerintahan yang baik, mandiri dan bebas KKN

Sasaran :

1. Meningkatnya kapasitas tata kelola dan akuntabilitas kinerja pemerintahan
2. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah

Dengan demikian maka Tujuan, dan Sasaran Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh yang tercantum dalam Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh, tujuan dan sasaran Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh 2022 dapat dirumuskan sebagai berikut :

Tujuan dan Sasaran RenjaBadanKeuangan Daerah Kota Sungai Penuh 2022

No	Tujuan	Sasaran
1.	Meningkakan kinerja pengelolaan pemerintahan yang baik, mandiri dan bebas KKN	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya kapasitas tata kelola dan akuntabilitas kinerja pemerintahan2. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Misi Kedua yang tertuang dalam RPJMD 2021-2024 Kota Sungai Penuh, yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, mandiri dan bebas KKN menjadikan peran Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh dalam Peningkatan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan asset daerah yang menekankan pada keserasian kebutuhan pengeluaran dan pendapatan dan Meningkatkan pengelolaan, peningkatan serta pengawasan kekayaan daerah dan manajemen asset daerah dalam menunjang meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Sungai Penuh sehingga pelaksanaan pembangunan tersebut dapat berjalan dengan maksimal. Badan Keuangan Daerah dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan menjadi kewenangan Daerah dalam bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah didukung dengan penerapan sistem informasi Keuangan Daerah.

Diharapkan dengan dilaksanakannya peningkatanpengelolaanPendapatan, Keuangan dan Aset Daerah , PemerintahDaerah dapatmeningkatkanKemadirian Daerah dalammencapaisasaran kinerja RPJMD 2021-2024, yang ditanda dengan:

- 1) Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
- 2) Hasil Audit BPK atas LKPD setiapTahunnya WTP
- 3) Meningkatnya PendapatanAsli Daerah
- 4) Tingkat KemandirianKeuangan Daerah
- 5) Efisiensi Pengelolaan PAD
- 6) Meningkatnya Perkembangan Aset Daerah
- 7) Jumlah Aset Pemerintah Kota Sungai Penuh yang bersertifikat

8) Penyelesaian Aset yang diserahkan Oleh Kabupaten Kerinci

Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh dalam upaya pencapaian target kinerja pada tahun 2022 untuk Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan menetapkan 4 program, sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pada tahun 2022 untuk melaksanakan program ini diusulkan pagu anggaran sebesar Rp.6,093,543,260,-, Program ini bertujuan untuk menyediakan :

- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Untuk melaksanakan program ini diusulkan pagu anggaran sebesar Rp.2.138.337.588,-, Program ini bertujuan untuk menyediakan :

- Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
- Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
- Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

5) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Untuk melaksanakan program ini diusulkan pagu anggaran sebesar Rp.656.340.000,-, Program ini bertujuan untuk menyediakan kegiatan pengelolaan barang milik daerah.

6) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Untuk melaksanakan program ini diusulkan pagu anggaran sebesar Rp.720.237.356,-, Program ini bertujuan untuk menyediakan kegiatan pengelolaan pendapatan daerah.

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja tahun sebelumnya, rancangan RKPD Kota Sungai Penuh tahun 2022, analisis kebutuhan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh, dan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh merencanakan program dan kegiatan untuk tahun 2022. Adapun rencana kerja program dan kegiatan Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2022 dapat dilihat pada table 3.1 di bawah ini.



Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan SKPD Tahun 2022
Dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 Badan Keuangan Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 Badan Keuangan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju (2023)	
					Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang										
5.02	Keuangan						9.608.458.204	APBD II			33.879.418.205
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel		Badan Keuangan Daerah	100%	6.093.543.260	APBD II		100%	21.165.650.000
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Badan Keuangan Daerah	3 Dokumen	157.392.900	APBD II		3 Dokumen	297.000.000
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi SKPD	Badan Keuangan Daerah	7 Dokumen	41.236.500	APBD II		7 Dokumen	66.000.000
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD (LKj-IP, LKPJ, LPPD, IKU, Cascading, Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan)	Badan Keuangan Daerah	16 Laporan	58.646.100	APBD II		16 Laporan	99.000.000
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Terlaksananya Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja SKPD	Badan Keuangan Daerah	4 Dokumen	57.510.300	APBD II		4 Dokumen	132.000.000



5.2.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Badan Keuangan Daerah	100%	5.417.118.061	APBD II		100%	19.300.300.000
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Persentase pelayanan administrasi dan Persentase pelayanan sarana dan prasarana perkantoran Persentase penyusunan dokumen/ laporan keuangan	Badan Keuangan Daerah	100%	5.269.900.861	APBD II		100%	19.000.000.000
5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Persentase pelayanan administrasi dan Persentase pelayanan sarana dan prasarana perkantoran Persentase penyusunan dokumen/ laporan keuangan	Badan Keuangan Daerah	100%	44.505.200	APBD II		100%	58.300.000
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Persentase pelayanan administrasi dan Persentase pelayanan sarana dan prasarana perkantoran Persentase penyusunan dokumen/ laporan keuangan	Badan Keuangan Daerah	100%	61.420.000	APBD II		100%	192.500.000
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Persentase pelayanan administrasi dan Persentase pelayanan sarana dan prasarana perkantoran Persentase penyusunan dokumen/ laporan keuangan	Badan Keuangan Daerah	100%	41.292.000	APBD II		100%	49.500.000
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Badan Keuangan Daerah	100%	62.571.534	APBD II		100%	275.000.000
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas Lapangan Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas Lapangan Beserta Perlengkapannya	Badan Keuangan Daerah	100 ID Card 100 Stel	6.096.500	APBD II		1 stel 100 stel	82.500.000
5.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur	Badan Keuangan Daerah	25 Aparatur/Tahun	56.475.034	APBD II		25 aparatur /tahun	192.500.000



5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				Badan Keuangan Daerah	100%	234.913.785	APBD II		100%	485.100.000
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor			Terpenuhinya Peralatan Listrik dan Penerangan Kantor	Badan Keuangan Daerah	11 Macam	3.805.000	APBD II		11 macam	8.800.000
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Rasio Bidang yang terpenuhi kebutuhannya per tahun	Badan Keuangan Daerah	6 Bidang	21.915.338	APBD II		6 bidang	46.200.000
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Badan Keuangan Daerah	2 Macam	1.900.000	APBD II		2 macam	19.800.000
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Terlaksananya Logistik Kantor Terlaksananya Makan dan Minum	Badan Keuangan Daerah	400 Macam 12 Bulan	14.242.000	APBD II		12 bulan 400 macam	34.100.000
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Terlaksananya Cetak dan Penggandaan	Badan Keuangan Daerah	13 Macam	9.700.400	APBD II		13 macam	33.000.000
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan			Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan	Badan Keuangan Daerah	2 Macam	7.500.000	APBD II		2 Macam	13.200.000
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Badan Keuangan Daerah	30 Kali	175.851.047	APBD II		30 Kali	330.000.000
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Badan Keuangan Daerah	100%	40.555.950	APBD II		100%	387.750.000
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Terciptanya Kondisi Kerja yang Baik dan Pelayanan yang Prima Terlaksananya pengadaan mesin/kartu absensi	Badan Keuangan Daerah	5 Unit	35.555.950	APBD II		5 Unit	385.000.000
5.02.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya			Terpenuhinya Perlengkapan Kantor	Badan Keuangan Daerah	1 Paket	5.000.000	APBD II		1 paket	2.750.000



5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemeritnahan Daerah				Badan Keuangan Daerah	100%	106.310.000	APBD II		100%	164.200.000
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Kantor/alamat yang dilayani pertahun	Badan Keuangan Daerah	86 SKPD	1.500.000	APBD II		86 skpd	4.400.000
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Rasio Bidang Yang Terpenuhi Kebutuhannya	Badan Keuangan Daerah	12 Bulan	95.830.000	APBD II		12 Bulan	110.000.000
5.02.01.2.08.03	Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Fasilitas MTQ Ke-51 Tingkat Provinsi Jambi	Badan Keuangan Daerah		-	APBD II		1 Kali	30.000.000
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Terlaksananya Pembayaran Honor Penjaga Kebersihan dan Tersedianya Bahan dan Alat-alat Kebersihan	Badan Keuangan Daerah	29 Macam	8.980.000	APBD II		29 Macam	19.800.000
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Badan Keuangan Daerah	100%	74.681.030	APBD II		100%	256.300.000
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Terpeliharanya dan Terawatnya Secara Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Badan Keuangan Daerah	8 Unit	54.048.430	APBD II		8 Unit	187.000.000
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	Badan Keuangan Daerah	7 Macam	16.130.000	APBD II		7 Macan	33.000.000
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Terciptanya Suasana Kerja yang Kondusif	Badan Keuangan Daerah	1 Jenis	4.502.600	APBD II		1 Jenis	36.300.000
5.2.2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Meningkatnya Kemandirian Daerah		Badan Keuangan Daerah	100%	2.138.337.588	APBD II		100%	8.362.114.155
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				Badan Keuangan Daerah	100%	722.191.930	APBD II		100%	4.869.614.155
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS			Terlaksananya Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2023	Badan Keuangan Daerah	2 Dokumen	192.678.900	APBD II		2 Dokumen	467.500.000
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			Terlaksananya penyusunan rancangan KUPA dan PPAS - P Tahun 2022	Badan Keuangan Daerah	2 Dokumen	75.768.800	APBD II		2 Dokumen	385.000.000



5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD			Terlaksananya Evaluasi Ranperda dan Perda APBD, Ranperwako dan Perwako tentang Penjabaran APBD TA.2023 Terlaksananya Verifikasi DPA SKPD	Badan Keuangan Daerah	2 Dokumen 2 Kali	41.645.630	APBD II		2 Dokumen 2 Kali	90.217.600
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD			Terlaksananya Evaluasi Ranperda dan Perda APBD, Ranperwako dan Perwako tentang Penjabaran APBD TA. 2023 Terlaksananya Verifikasi RKA Perubahan SKPD TA.2023	Badan Keuangan Daerah	2 Dokumen 2 Kali	18.057.800	APBD II		2 Dokumen 2 Kali	500.000.000
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD			Terlaksananya Verifikasi DPA SKPD	Badan Keuangan Daerah	2 Kali	71.475.000	APBD II		2 Kali	1.093.757.143
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD			Terlaksananya Verifikasi DPA Perubahan SKPD	Badan Keuangan Daerah	2 Kali	60.600.000	APBD II		2 Kali	506.351.912
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			Terlaksananya Evaluasi Ranperda dan Perda APBD, Ranperwako dan Perwako tentang Penjabaran APBD TA.2023 Terlaksananya Tahapan dan Penyusunan Perda APBD Murni TA.2023 Terlaksananya Tahapan Penyusunan Penyusunan Perwako APBD Murni TA. 2023 Terlaksananya Verifikasi DPA SKPD	Badan Keuangan Daerah	2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Kali	19.631.800	APBD II		2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Kali	500.000.000
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			Terlaksananya Tahapan dan Penyusunan Perda tentang APBD-P TA 2022, Asistensi RKA SKPD Perubahan TA 2022, Penyampaian Nota Keuangan RAPBD-P TA 2022	Badan Keuangan Daerah	4 Dokumen	25.964.000	APBD II		4 Dokumen	500.000.000
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran			Terlaksananya Penyusunan Regulasi Standar Perjalanan Dinas Terlaksananya Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Keuangan Daerah Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan tentang pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Keuangan Daerah	1 Regulasi 2 Dokumen 2 Kali	98.581.000	APBD II		1 Regulasi 2 Dokumen 2 Kali	550.000.000



5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah			Terlaksananya Penyusunan Regulasi Analisa Standar Belanja (ASB)	Badan Keuangan Daerah	1 Regulasi	58.950.000	APBD II		1 Regulasi	110.000.000
5.02.02.2.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan			Terlaksananya Fasilitasi Penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial Terlaksananya Fasilitasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan Terlaksananya Penyusunan Perwako Hibah	Badan Keuangan Daerah	1 Dokumen 12 Bulan 1 Regulasi	58.839.000	APBD II		1 Dokumen 12 Bulan 1 Regulasi	166.787.500
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				Badan Keuangan Daerah	100%	671.433.078	APBD II		100%	1.617.000.000
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah			Terlaksananya Laporan PNSD Gaji dan Tunjangan serta TPP Terlaksananya Pembukuan dan Pelaporan Dana Transfer Terlaksananya penyusunan Laporan Kas Daerah Terlaksananya penyusunan Laporan Perkiraan Belanja SIMPATIK Terlaksananya penyusunan Laporan Realisasi SINERGI Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah yang cepat, tepat dan akurat	Badan Keuangan Daerah	12 Laporan 2 Dokumen 260 Laporan 12 Dokumen 1 Tahun	99.698.500	APBD II		12 Laporan 2 Dokumen 260 Laporan 12 Dokumen 1 Tahun	165.000.000
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD			Terlaksananya Laporan Transaksi Non Tunai Terlaksananya Penerbitan SP2D dan Penyusunan Laporan Realisasi SKPD Terlaksananya Penyusunan Anggaran Kas dan Penerbitan SPD SKPD Terlaksananya Penyusunan Sistem Indormasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Keuangan Daerah	2 Laporan 12 Bulan 4 Triwulan 1 Sistem	217.230.128	APBD II		2 Laporan 12 Bulan 4 Triwulan 1 Sistem	495.000.000
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya			Terlaksananya Pembukuan dan Pelaporan Dana Transfer		4 Dokumen	71.749.650	APBD II		4 Dokumen	110.000.000



5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)			Terlaksananya penyusunan Laporan Pajak Bulanan Tersedianya BA Rekonsiliasi Pajak antara KPPN, KPP dan Pemkot Sungai Penuh sebagai syarat penyaluran DBH Pajak	Badan Keuangan Daerah	12 Laporan 2 Laporan	75.346.000	APBD II		12 Laporan 2 Laporan	143.000.000
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait			Terlaksananya Rekonsiliasi Posisi Kas Daerah Antara Pembukuan BUD dengan Pihak Bank	Badan Keuangan Daerah	4 Dokumen	90.198.800	APBD II		4 Dokumen	132.000.000
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan			Terlaksananya Penerbitan Daftar Gaji SKPD Terlaksananya Petunjuk Teknis Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Terlaksananya Petunjuk Teknis Penerimaan dan pengeluaran Kas Tertibnya Administrasi Pembayaran Gaji Pegawai Kota Sungai Penuh	Badan Keuangan Daerah	62 SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 12 Bulan	41.460.000	APBD II		62 SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 12 Bulan	176.000.000
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota			Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi SIPD Keuangan Terlaksananya Petunjuk Teknis Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Terlaksananya Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Berbasis Aplikasi	Badan Keuangan Daerah	1 Kali 1 Database 75 SKPD	75.750.000	APBD II		1 Kali 1 Database 75 SKPD	396.000.000



RENCANA KERJA

2022

5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				Badan Keuangan Daerah	100%	659.407.480	APBD II		100%	1.573.000.000
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah			Terlaksananya Transaksi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Badan Keuangan Daerah	12 Laporan	58.893.208	APBD II		12 Laporan	121.000.000
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban			Terlaksananya Rekonsiliasi dan asistensi/Pembinaan Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, LO, Neraca, LPE SKPD	Badan Keuangan Daerah	12 Laporan	59.791.000	APBD II		12 Laporan	132.000.000
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			Laporan Keuangan semester Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Sungai Penuh Laporan Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Sungai Penuh Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Sungai Penuh	Badan Keuangan Daerah	2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan	257.636.980	APBD II		2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan	572.000.000
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			Terlaksananya penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD Kota Sungai Penuh Tahun 2020 Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD Kota Sungai Penuh Tahun 2020	Badan Keuangan Daerah	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	133.046.840	APBD II		1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	440.000.000
5.02.02.2.03.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			Terlaksananya Penanganan Kasus TPTGR Terlaksananya Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Badan Keuangan Daerah	4 Kasus 1 Laporan	39.445.924	APBD II		4 Kasus 1 Laporan	110.000.000



5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah			Terlaksananya Sosialisasi dan Pembinaan Tentang Penyusunan LKPD Kota Sungai Penuh Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	Badan Keuangan Daerah	1 Kali	75.074.000	APBD II		1 Kali	132.000.000
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah			Terlaksananya penyusunan Rancangan KDH Tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi, Bagan Akun Standar Akuntansi Pemerintah Daerah	Badan Keuangan Daerah	2 Laporan	35.519.528	APBD II		2 Laporan	66.000.000
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				Badan Keuangan Daerah	100%	85.305.100	APBD II		100%	302.500.000
5.02.02.2.04.07	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi			Terlaksananya Penyusunan Kebijakan , Alokasi dan Pemberian Subsidi	Badan Keuangan Daerah	5 Dokumen	50.392.500	APBD II		5 Dokumen	137.500.000
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan			Terfasilitasinya Penyaluran Dana Desa/ Alokasi Dana Desa / Kelurahan Terlaksananya Penyusunan Kebijakan, Alokasi dan Penyaluran Bantuan keuangan Khusus	Badan Keuangan Daerah	69 Desa 5 Dokumen	34.912.600	APBD II		69 Desa 5 Dokumen	165.000.000
5.2.3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Meningkatnya Kemandirian Daerah		Badan Keuangan Daerah	100%	656.340.000	APBD II		100%	2.444.608.206
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah				Badan Keuangan Daerah	100%	656.340.000	APBD II		100%	2.444.608.206
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga			Tersusunnya Draft Standar SBU, SSH dan HSPK Ta. 2022	Badan Keuangan Daerah	3 Dokumen	85.946.800	APBD II		3 Dokumen	200.000.000
5.02.03.2.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah			Tersusunnya Draft Standar SBU, SSH dan HSPK Ta. 2022 Tersusunnya Standar SBU, SSH dan HSPK Ta. 2022	Badan Keuangan Daerah	3 Dokumen 3 Dokumen	69.404.500	APBD II		3 Dokumen 3 Dokumen	184.149.900



5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah			Terlaksananya Penyusunan Laporan Pengadaan RKBMD, RKPBM, DKBMD ta 2022 Terlaksananya Penyusunan Perubahan Laporan Pengadaan RKBMD, RKPBM, dan DKBMD ta 2022	Badan Keuangan Daerah	1 Laporan 1 Laporan	54.137.000	APBD II		1 Laporan 1 Laporan	184.149.900
5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah			Terlaksananya Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Keuangan Daerah	1 Laporan	54.137.000	APBD II		1 Laporan	55.000.000
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah			Terlaksananya Kegiatan Penataan Administrasi dan Pengelolaan Aset Terlaksananya Pelatihan Singkat Penataan	Badan Keuangan Daerah	7 Jenis Aset 100 %	68.365.000	APBD II		7 Jenis Aset 100 %	348.633.615
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah			Terlaksananya Verifikasi dan Pembuatan Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Kota Sungai Penuh Ta. 2022 Milik Daerah	Badan Keuangan Daerah	25 Sertifikat	49.814.350	APBD II		25 Sertifikat	121.000.000
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah			Terlaksananya Penilaian Aset Daerah Kota Sungai Penuh Ta. 2022	Badan Keuangan Daerah	7 Jenis	20.840.000	APBD II		7 Jenis	184.298.400
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah			Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Keuangan Daerah	1 Laporan	54.137.000	APBD II		1 Laporan	110.000.000
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Badan Keuangan Daerah	1 Laporan	57.558.350	APBD II		1 Laporan	181.500.000



5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			Terlaksananya Pendataan Barang Milik Daerah Melalui Aplikasi SIMDA-BMD Terlaksananya Rekonsiliasi Aset Lancar & Aset Tetap Ta. 2022	Badan Keuangan Daerah	1 Data 1 Laporan	52.800.000	APBD II		1 Data 1 Laporan	327.379.415
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			Terlaksananya Penyusunan Laporan BMD Kota Sungai Penuh Ta. 2022	Badan Keuangan Daerah	1 Laporan	55.800.000	APBD II		1 Laporan	383.496.976
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			Terlaksananya BIMTEK untuk Pengurus Barang, Pengguna Barang, Pembantu Pengurus Barang dan Penyimpan Barang SKPD Ta.2022	Badan Keuangan Daerah	85 SKPD	33.400.000	APBD II		85 SKPD	165.000.000
5.2.4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government	Meningkatnya Kemandirian Daerah		Badan Keuangan Daerah	100%	720.237.356	APBD II		100%	1.907.045.844
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah				Badan Keuangan Daerah	100%	720.237.356	APBD II		100%	1.907.045.844
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penerimaan PAD Terlaksananya penyusunan Laporan PAD Terlaksananya Penyusunan Perwako Pajak Daerah. Terlaksananya Sosialisasi PBB dan Pajak Daerah Lainnya	Badan Keuangan Daerah	4 Kali 12 Laporan 3 Perwako 8 Kecamatan	265.082.046	APBD II		4 Kali 12 Laporan 3 Perwako 8 Kecamatan	1.050.500.000
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			Terlaksananya Host to Host PBB-P2 dan BPHTB bersama BPN Kota Sungai Penuh Terlaksananya Penilaian dan Verifikasi Objek PBB-P2 dan BPHTB Tersedianya DHKP PBB-P2 Tersedianya Laporan Dana Perimbangan Pusat dan Provinsi Tersedianya SPPT PBB-P2	Badan Keuangan Daerah	1 Aplikasi 100 Dokumen 69 Desa 12 Laporan 20000 SPPT	119.214.800	APBD II		1 Aplikasi 100 Dokumen 69 Desa 12 Laporan 20000 SPPT	220.000.000



RENCANA KERJA

2022

5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah			Terlaksananya maintenance aplikasi SIAPDA, SIM PBB dan BPHTB , Terlaksananya Pembayaran Biaya Pemungutan PBB untuk Petugas Pemungut Desa/Kelurahan Terlaksananya Pemuktahiran Basis Data Wajib Pajak Daerah Kota Sungai Penuh Tersedianya data Piutang Pajak Daerah	Badan Keuangan Daerah	3 Aplikasi 69 Desa 9 Jenis Pajak Daerah 9 Dokumen	144.595.510	APBD II		3 Aplikasi 69 Desa 9 Jenis Pajak Daerah 9 Dokumen	275.000.000
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah			Terlaksananya Pelayanan Pajak Daerah Terlaksananya Penatausahaan Pajak Daerah	Badan Keuangan Daerah	44 SKPD 9 Dokumen	34.000.000	APBD II		44 SKPD 9 Dokumen	66.000.000
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah			Terlaksananya Penyediaan karcis Retribusi dan Benda Berharga lainnya Terlaksananya Parforasi Karcis Retribusi Terlaksananya penatausahaan pendistribusian karcis dan benda berharga	Badan Keuangan Daerah	4400 Blok 4400 Blok 4400 Blok	128.245.000	APBD II		4400 Blok 4400 Blok 4400 Blok	253.000.000
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah			Terlaksananya Pendataan Wajib Pajak Daerah Terlaksananya Penyusunan SOP Pajak Daerah	Badan Keuangan Daerah	5 Jenis Pajak Daerah 9 Dokumen	29.100.000	APBD II		5 Jenis Pajak Daerah 9 Dokumen	42.545.844
TOTAL ANGGARAN (Rp.)							9.608.458.204				33.879.418.205

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KEUANGAN DAERAH

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya, rancangan RKPD Kota Sungai Penuh tahun 2022, analisis kebutuhan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh, dan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh merencanakan program dan kegiatan untuk tahun 2022. Adapun rencana program dan kegiatan Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2022 dapat dilihat pada table matriks rencana kerja Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh tahun 2022 yang tertuang pada tabel 4.1 sebagai berikut :



BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2022 ini disusun, sesuai dengan target pencapaian kinerja tahunan sebagaimana telah tercantum dalam RPJMD 2021-2025, dalam Rencana Kerja Tahun 2022 ini tidak hanya menyangkut langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai target-target yang ingin dicapai, akan tetapi mengatur juga penggunaan berbagai sumber daya baik yang telah dimiliki maupun yang diperlukan secara optimal, dengan memperhatikan irama perubahan lingkungan sesuai dengan tuntutan yang berkembang.

Rencana Kerja tahun 2022 ini merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap aparat Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2022. Adapun Keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan ini bergantung kepada partisipasi, sikap mental, semangat, ketaatan, disiplin, serta kejujuran aparat. Rencana Kerja Tahun 2022 memuat Kerangka Kerja Tahunan Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh. Keluaran utama dari proses penyusunan Renja SKPD adalah berisikan status, posisi, kedudukan dan kinerja SKPD dalam penyelenggaraan berbagai fungsi, urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah serta rumusan kondisi internal (kelemahan dan kekuatan) dan kondisi eksternal (tantangan dan peluang) dalam beberapa tahun kedepan. Dokumen Renja SKPD berisikan daftar program, kegiatan dan pagu indikatif SKPD serta sumber pendanaannya. Kaidah – kaidah pelaksanaan yang perlu ditetapkan Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh, yaitu :

1. Renja Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh tahun 2022 tidak hanya memuat program, kegiatan – kegiatan, Sub Kegiatan dan pelayanan publik, tetapi juga memuat strategi pendanaan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
2. Unit – unit kerja dan seluruh stakeholder pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan program – program/ Kegiatan Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah dengan sebaik – baiknya;
3. Sebagai pedoman penyusunan program kegiatan, Rencana Anggaran dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh tahun 2022, Renja Badan Keuangan Daerah Kota

Sungai Penuh Tahun 2022 ini disusun dengan mengikuti pendekatan dalam perencanaan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

4. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Rencana Kerja SKPD tahun 2022, Badan Keuangan Daerah berkewajiban untuk melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan.
5. Program dan Kegiatan yang disusun berdasarkan Visi dan Misi Kota Sungai Penuh yang diwujudkan dalam Visi dan Misi Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh, yang dilaksanakan sesuai dengan Tujuan, sasaran. Strategi serta kebijakan yang terdapat dalam RPJMD 2021-2025.

Adapun saran/tindak lanjut Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2022 antara lain :

1. Diperlukan perhatian khusus pada peningkatan PAD yang merupakan sumber pendapatan daerah;
2. Diperlukan perhatian khusus pada pengelolaan barang/aset milik daerah;
3. Diperlukan perhatian khusus pada Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan.

Kebijakan dan program Renja ini merupakan upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh. Selain itu rencana program dan kegiatan yang dituangkan dalam langkah ini masih bersifat indikatif. Dalam operasionalisasinya pembangunan Kota Sungai Penuh dengan kemandirian sistem pengelolaan Pendapatan, Anggaran, Keuangan dan Aset Daerah serta sekaligus dengan segala masalah yang kompleks, karena menyangkut berbagai aspek dan dimensi serta melibatkan berbagai pihak dengan permasalahan yang saling terkait dan luas. Oleh karena itu diharapkan pelaksanaan nantinya dapat dilaksanakan secara bertahap,



terencana, sistimatis, sinkron dan terkoordinasi antara Pemerintah Daerah dengan pihak lainnya.

Selain itu dukungan maupun *Political Will* dari pemerintah daerah dan seluruh organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Sungai Penuh juga menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Tanpa adanya dukungan tersebut kegiatan yang telah direncanakan tidak akan berhasil serta hasil yang telah dicapai dari kegiatan di bidang pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah tidak akan mempunyai arti dan manfaat bagi kepentingan pemerintah daerah khususnya, serta masyarakat Kota Sungai Penuh pada umumnya.

Sungai Penuh, Juli 2021



**KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH**

AFYAR, ST, MT

Pembina Tk. I

NIP. 19731227 200604 1 015